

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT KECIL DI KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Rusdi^{1*)} dan Hagai Neman²⁾

^{1,2)} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong

rusdi@um-sorong.ac.id^{*)}

Abstrak

Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dipedesaan yang tertinggal. Untuk melaksanakan lokasi program kegiatan maka dibentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang merupakan salah satu pelaku pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan PNPM Mandiri memiliki 2 Program yaitu program fisik dan program non fisik yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi daklam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa melalaui program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi local. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, serta menggunakan teknik validasi dat trigulasi yaitu menggunakan model reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari menggunakan analisi SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberdayaan masayarakat memberikan dampak yang sangat poisitif bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: Kebijakan; Strategi; Usaha Kecil.

Abstract

In 2005 the Government issued PNPM Mandiri (National Program for Independent Rural Community Empowerment) to carry out community empowerment activities in disadvantaged rural areas. To implement the location of the activity program, a UPK (Activity Management Unit) was formed which is one of the actors in community empowerment at the sub-district level. PNPM Mandiri has 2 programs, namely physical programs and non-physical programs aimed at empowering the community. This study aims to determine the strategy for empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in rural communities through the Activity Management Unit (UPK) program to develop the local economy. In this study using a qualitative research approach. Data collection techniques using interviews, observation, documentation, and using data validation techniques trigulation, namely using data reduction models, presenting data and drawing conclusions from using SWOT analysis. The results of the study show that community empowerment has a very positive impact on the underprivileged.

Keywords: Policy; Strategy; Small Business.

PENDAHULUAN

Usaha kecil menengah (UKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru. Usaha kecil menengah juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Saat ini usaha kecil menengah telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Menurut William Dun (1999) kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marban (2007) di katakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi pernyataan cita-cita tujuan prinsip atau juga maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Menurut David (2006: 17) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Kuncoro (2005 : 12) strategi merupakan penentuan kerangka kerja dan aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan

mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.

Secara umum, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok yang teliti memenuhi kriteria sebagai usaha Mikro. Menurut UU No 20 Tahun 2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha kecil menengah merupakan salah satu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha kecil menengah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009, Indonesia memiliki Rp.51,3 juta unit UMKM. Selain itu, terdapat 97,1% atau sekitar 90,9 juta tenaga kerja di Indonesia yang bertanggung jawab pada sektor UMKM. Kontribusi UMKM bagi produk domestik bruto mencapai Rp.2.609,4 triliun atau 5 5,6%. UMKM juga menyumbang devisa Negara sebesar Rp. 183,8 triliun atau 20,2%. Selanjutnya, UMKM juga turut adil bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar dua hingga empat persen dan nilai investasinya signifikan mencapai Rp.6400,4 triliun atau 52,9%. Usaha kecil menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur, selain itu usaha kecil menengah telah berkontribusi besar pada pendapatan negara Indonesia. Usaha

kecil menengah juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah sumber-sumber. Dan survei yang dilakukan penulis menemukan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dalam menjalankan usaha adalah kurang atau minimnya modal usaha, belum memaksimalkan pemasaran online, tidak memiliki mentor, dan tidak memiliki izin usaha resmi dan pemerintah setempat. Akibatnya, para pengusaha tidak menaikkan jumlah produksi usahanya untuk mencapai omset lebih banyak. Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang "Kebijakan dan Strategi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data. Menurut Denzin dan Lincoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dan sisi kuantitas, jumlah serta pemahaman yang berdasarkan pada metodologi penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi atau sampel pada masyarakat pelaku usaha kecil di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk pelaku usaha kecil di wilayah Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Teknik pengumpulan

data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Usaha Masyarakat di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernalais pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat. Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi,

permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Agustina Rianta Krenak, S. IP selaku Kepala Kelurahan Malaweke bahwa :

“.....Memberdayakan masyarakat adalah pekerjaan pemerintah yang paling inti dan utama yang harus dilakukan, apalagi di bidang perekonomian. Karena suatu daerah dikatakan berhasil membangun daerahnya apabila masyarakatnya terberdaya baik dalam sisi pendidikan maupun ekonominya, dan terberdayaanya masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraannya”.

Kartasmita menjelaskan, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, prasarana dan sarana dasar baik fisik, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

Beragam strategi yang terurai dalam kegiatan Pemerintah daerah dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat setempat. Hal serupa dikemukakan Ibu Agustina Rianta Krenak,

S.IP selaku Kepala Kelurahan Malaweke bahwa :

“.....Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi, langkah paling utama yang harus dilakukan adalah melihat potensi yang dimiliki daerah tersebut, menganalisis apa yang menjadi kendala dan mencari solusinya. Pemerintah Kabupaten Sorong (PMD,PP,PA) sejauh ini sudah melihat langsung ,menganalisis kendala-kendala yang telah dihadapi dan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Rumah Kreatif Kab. sorong sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini”.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk pelaku ekonomi kreatif.

Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk menggabungkan potensi ekonomi dan berbagai sumber daya masyarakat yang akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Pembentukan kelompok juga ditujukan untuk meningkatkan “*bargaining position*” dalam berbagai kepentingan misalnya untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya pemasaran produk.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil.

1. Faktor Pendorong

a) Pemerintah

Pemerintah berkepentingan untuk memberdayakan masyarakat industri

berbasis ekonomi kreatif agar semakin kreatif dan produktif. Sebagai pemegang kepentingan, pemerintah berfungsi melakukan regulasi, layanan dan koordinasi. Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat Industri Kab. Sorong mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dilihat dari usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Rumah Kreatif Kab. Sorong dalam memonitoring potensi-potensi lokal desa yang dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang dapat diproduksi dan dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa.

b) Masyarakat

Masyarakat berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif, dan kepemilikan usaha. Masyarakat harus bisa bermitra, mengadaptasi, mengembangkan usahanya sendiri dengan cara mengubah pola pikir mereka bahwa apa yang dilakukannya harus ada nilai tambah dan berkualitas. Semangat dan respon positif dari masyarakat. Ini terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses pembuatan produk yang tergolong sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarakat. selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan produksi yang membuat masyarakat tertarik.

2. Faktor Penghambat

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Namun dalam penelitian ini sumber daya manusia menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat

industri berbasis ekonomi kreatif. Sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang harus di sentuh oleh pemerintah dalam terwujudnya masyarakat yang terberdaya dan sejahtera, namun dalam hal ini sumber daya manusia atau masyarakat masih kurang yang berpikir untuk melangkah lebih maju, dikarenakan pemikiran yang masih takut untuk mencoba.

b) Modal

Kekurangan modal (*lack of capital*), terutama modal finansial untuk pengadaan dan pembiayaan operasional ekonomi kreatif. Kekurangan modal finansial akan menghambat kegiatan ekonomi kreatif terutama untuk mewujudkan gagasan kedalam bentuk produk ekonomi kreatif yang riil.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa :

- a) Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner ada 3 yaitu Tataan regulasi, pengarahan strategi, dan Pelatihan. Pemberdayaan melalui upaya yang ditempuh oleh pemerintah itu sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Faktor pendorong pemerintah dalam pemberdayaan usaha masyarakat kecil adalah Dukungan Multipihak baik dari Pemerintah (PMD, Koperasi, RKB), Semangat dan respon positif dari masyarakat yang terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses pelatihan yang tergolong mudah

sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang "Usaha Kecil"

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

AR. Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: LAN

Anthony, N. Robert, and Vijay GovindaraJari. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat., 2000.

David, 2006. "strategi merupakan alat untuk mencapai tujuanJ angka panjang"

Denzin,N., & Lincoln, Y, Handbook of Qualitative Research,. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press. Fricilia dan Legowo. 2013

Hit, Ireland dan Hoskisson, "Strategy is an integrated and coordinated set of cominitments and actions designed to exploit core coinpetencies and gain a competitive advantage", Sampoma 2003: 03)

Johnson, Scholes, K., dan Whittington, R., 2008., Exploring Corporate. Strategis.

Kuncoro, 2005. "Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif" (2005: 1-2)

Mintzberg, Henry, James B. Quin dan John Voyer. Strategy Process New Jersey: Prentice Hall. 1995.

Mudrajad, Kuncoro. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga. Jakarta. ikatan Akuntan Indonesia. 2007